

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan daerah ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, sejalan dengan penyusunan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Solok juga berkewajiban menyusun Renja SKPD. Renja Bappeda Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan RKPD Kota Solok Tahun 2016. Renja Bappeda Tahun 2016 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2010-2015. Walaupun Renstra Bappeda Kota Solok tahun 2010–2015 akan habis periodenya tahun 2015 ini, tapi dokumen tersebut masih dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan sampai tersedianya Renstra yang baru.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Solok Tahun 2016 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Bappeda. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kota Solok dibidang perencanaan pembangunan, Bappeda mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan

kebijakan teknis dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, dan Statistik serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Solok dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan. Di satu sisi tuntutan masyarakat akan pembangunan terus bertambah sementara itu di sisi lain anggaran yang bisa dipergunakan untuk pembangunan sangat terbatas, sehingga dibutuhkan kehandalan dari para perencana untuk meramu dokumen perencanaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas tertentu. Dalam dokumen Renja inilah dijabarkan program/kegiatan yang akan dilakukan oleh Bappeda Kota Solok pada tahun 2016 mendatang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Renja Bappeda Tahun 2016 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Renja Bappeda dan Renstra Bappeda

Renja Bappeda merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda. Pelaksanaan Renja Bappeda merupakan upaya untuk mencapai sasaran strategis lima tahunan yang telah ditargetkan dalam Renstra Bappeda. Untuk tahun 2016, Renstra yang dipedomani masih Renstra Bappeda Tahun 2010-2015, karena Renstra periode berikutnya baru dapat disusun setelah RPJMD tahun 2015-2020 disusun.

b. Renja Bappeda dan RKPD

Rancangan Renja Bappeda Tahun 2016 disusun mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Tahun 2016. Rancangan Renja Bappeda kemudian disempurnakan dengan berpedoman kepada RKPD tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Walikota.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012.
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2010-2015.
10. Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.
11. Keputusan Kepala Bappeda Nomor 188.4/ 109 /KPTS/BAPPEDA-2013 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra-Bappeda) Tahun 2010-2015.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016.

Tujuan disusunnya Renja ini adalah memberikan arah dan petunjuk tentang tahapan pelaksanaan program/kegiatan Bappeda Kota Solok selama 1 tahun agar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Bappeda.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Bappeda Kota Solok Tahun 2016 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan Bappeda tahun 2016.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dari Renja Bappeda dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-BAPPEDA TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi Kinerja perlu dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu untuk tahun 2010 - 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. Hasil pengukuran kinerja kegiatan Bappeda Kota Solok memuat program, kegiatan, uraian, indikator kinerja, Rencana Tingkat Capaian (Target), Realisasi dan Persentase Rencana Tingkat Capaian (Target).

Alokasi anggaran Bappeda Kota Solok pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.6.169.625.533,- yang dipergunakan untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.554.841.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.614.784.533,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 14 program yang dijabarkan dalam 38 kegiatan.

Secara umum 14 program dan 38 kegiatan telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai rencana, meskipun ada 3 kegiatan yang tidak dapat diselesaikan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan realisasi fisik 96%, kegiatan koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dengan realisasi fisik 75% dan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi dengan realisasi fisik 88%.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tidak dapat diselesaikan dikarenakan salah satu output dari kegiatan tersebut tidak dapat dicapai, yaitu, evaluasi RKPD Semester 2 (triwulan III dan

IV) Tahun 2014. Evaluasi RKPD ini diundur pelaksanaannya pada Tahun 2015 disebabkan karena data realisasi fisik dan keuangan untuk triwulan IV datanya diperoleh di awal tahun 2015 sehingga kegiatan penulisan Evaluasi RKPD semester II dilaksanakan pada tahun 2015.

Sementara itu penyebab rendahnya realisasi fisik kegiatan koordinasi perencanaan sanitasi permukiman adalah rencana kerjasama penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG) sanitasi dengan anggaran sebesar Rp.74.000.000,- dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) UNP, belum terlaksana karena PPIDS UNP yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) masih dalam proses perpanjangan MoU dengan BIG. Proses perpanjangan MoU PPIDS dengan BIG baru selesai di bulan November sehingga waktu yang tersedia tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan penyusunan SIG sanitasi, sehingga penyusunan SIG sanitasi dianggarkan kembali pada tahun 2015.

Tidak tercapainya target Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi adalah tidak berjalannya aplikasi modul perencanaan sebagaimana mestinya, dimana aplikasi mengalami *error*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dicoba untuk dikonsultasikan kepada konsultan yang membangun software tersebut terkait dengan jaminan kerusakan perangkat lunak tersebut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 disajikan dalam Lampiran Renja ini.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Keberhasilan suatu SKPD dapat diukur salah satunya melalui indikator kinerja utama yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Solok yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Solok nomor 188.45/413/KPTS/WSL-2011, serta melalui pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2010-2015, maka secara umum sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Bappeda tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik. Rincian pencapaian dan analisis kinerja masing-masing indikator sasaran pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1) **Persentase ketersediaan data perencanaan**

Berdasarkan *basic data* pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kota Solok terdapat 1202 item data yang seharusnya tersedia untuk perencanaan. Persentase ketersediaan data tahun 2014 ditargetkan sebesar 85% atau 1022 item dan dapat terealisasi sebesar 90,18% atau 1084 item. Dengan demikian pencapaian indikator sasaran untuk persentase ketersediaan data tahun 2014 adalah sebesar 106,09%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, persentase ketersediaan data ini telah dapat ditingkatkan yaitu dari 80% menjadi 90,18%. Peningkatan ketersediaan data untuk perencanaan ini dapat tercapai karena adanya Forum Data. Forum data merupakan suatu forum yang beranggotakan 1 orang dari masing-masing SKPD sumber data yang bertanggung jawab dengan ketersediaan data SKPD yang bersangkutan. Forum data ini bertugas menyediakan data dan meng-update data secara berkala.

2) **Akurasi data perencanaan**

Target persentase akurasi data Tahun 2014 ditetapkan sebesar 75% atau 770 item dari total 1022 item data yang tersediadan dapat dicapai sebesar 80,26%, yaitu terdapat sejumlah 870 item data yang akurat dari total 1084 data yang tersedia. Sehingga pencapaian indikator sasaran untuk akurasi data perencanaan adalah 107,01 %.

Pencapaian indikator sasaran diatas pada tahun 2014 telah dapat melebihi target yang ditetapkan. Demikian juga apabila dibandingkan dengan tahun 2013, realisasi persentase akurasi data tahun 2014 telah lebih baik yaitu pada tahun 2013 terealisasi sebesar 70%, dan pada tahun 2014 dapat ditingkatkan menjadi 80,26%. Hal ini juga tidak terlepas dari peranan Forum Data dalam menyediakan dan memverifikasi akurasi data yang ada. Dengan adanya data yang akurat ini diharapkan setiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Solok menjadi lebih baik.

3) **Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan**

Pada tahun 2014 ditargetkan seluruh dokumen perencanaan yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan agenda pemerintahan daerah. Dokumen perencanaan yang ditargetkan untuk diselesaikan tahun 2014, yaitu RKPD Tahun 2015, Perubahan RKPD 2014, KUA Perubahan Tahun 2014, PPAS Perubahan Tahun 2014, KUA Tahun 2015, PPAS Tahun 2015, Solok Dalam Angka tahun 2014 dan PDRB Kota Solok Tahun 2014. Dari 8 (delapan) dokumen tersebut 6 dokumen dapat diselesaikan tepat waktu, sementara 2 (dua) dokumen lainnya, KUA dan PPAS 2015, tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena menurut agenda kerja pemerintahan daerah seharusnya dokumen ini telah dapat diselesaikan pada akhir bulan Juli 2014, namun dengan adanya pelantikan anggota DPRD baru periode 2015-2019 mengakibatkan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 2015 baru dapat disepakati pada bulan Desember 2014 setelah terbentuknya alat kelengkapan dewan yang baru. Dengan demikian persentase capaian kinerja untuk tahun 2014 adalah 75%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, maka target kinerja tahun 2014 juga tidak mencapai target yang ditetapkan semula yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2014 ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013, yang disebabkan karena jumlah dokumen yang disusun tahun 2014 hanya 8 dokumen, sedangkan tahun 2013 terdapat 9 dokumen perencanaan yang disusun.

4) **Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi**

Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 direncanakan sebesar 100% atau seluruh indikator kinerja dalam RPJMD dapat mencapai target yang telah direncanakan. Sampai dengan akhir tahun 2014, dari 43 indikator yang ada hanya 20 indikator yang memenuhi target yang telah ditetapkan (46,51%). Sedangkan 23 indikator lainnya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja indikator ini hanya sebesar 46,51%. Rendahnya capaian kinerja bidang ekonomi ini disebabkan karena beberapa indikator bidang pertanian tidak dapat dicapaiseperti tingkat pendapatan petani dan produktivitas hasil pertanian yang masih rendah sertapenerapan teknologi yang belum sesuai aturan. Penyebab lainnya adalah belum adanya kelembagaan satu pintu untuk penanaman

modal sehingga aplikasi untuk penanaman modal belum bisa dilaksanakan pengadaannya.

5) **Tingkat pencapaian target pembangunan bidang Sosial budaya**

Di bidang sosial budaya terdapat 155 indikator pembangunan yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015. Sesuai dengan Renstra Bappeda tahun 2010-2015, direncanakan seluruh indikator ini atau 100% dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun, dari 155 indikator tersebut hanya 100 indikator yang telah mencapai target atau hanya 64,51%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini hanya 64,51%. Rendahnya capaian kinerja indikator ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator yang tidak dapat memenuhi target seperti jumlah sekolah yang melaksanakan RSBI tidak dapat tercapai disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang menghapuskan pelaksanaan RSBI pada tahun 2013. Indikator lainnya yang tidak dapat mencapai target adalah sertifikasi guru dan rasio guru per murid.

6) **Tingkat pencapaian target pembangunan bidang Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam**

Pencapaian target pembangunan di bidang prasarana wilayah semula direncanakan sebesar 100%, dan terealisasi sebesar 75% yaitu dari 36 indikator RPJMD bidang prasarana wilayah, 27 indikator telah mencapai target, atau yang tidak mencapai target sebanyak 9 indikator. Indikator yang tidak mencapai target diantaranya persentase penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, persentase tingkat ketersediaan prasarana perhubungan, dan rata-rata kejadian pelanggaran lalu lintas, serta beberapa indikator lainnya.

7) **Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan**

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Solok untuk selalu melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Mekanisme pelibatan masyarakat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Partisipatif. Proses perencanaan yang

melibatkan peran serta masyarakat ini juga menjadi target indikator dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yaitu persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD.

Partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD yaitu hadir sebanyak 212 orang dari 235 komponen masyarakat yang diundang atau 90,21%. Angka ini melebihi target yang ada yaitu sebesar 85%. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sudah cukup tinggi bahkan melebihi target.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, tingkat partisipasi masyarakat tahun 2014 ini mengalami kenaikan cukup besar, dimana pada tahun 2013 jumlah komponen masyarakat yang hadir hanya sebanyak 190 orang.

8) **Tingkat usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan**

Jumlah seluruh usulan masyarakat pada Musrenbang adalah sebanyak 385 usulan yang terbagi pada tiga bidang, yaitu bidang ekonomi sebanyak 58 usulan, bidang prasarana wilayah sebanyak 253 usulan dan bidang sosial budaya sebanyak 74 usulan. Dari semua usulan tersebut, yang dapat ditampung dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 149 usulan dengan rincian; bidang ekonomi 33 usulan, bidang praswil 81 usulan dan bidang sosbud 35 usulan.

Jika dipersentasekan maka usulan yang dapat ditampung dalam dokumen perencanaan adalah sebesar 38,70 %. Dibandingkan dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2014 sebesar 93 %, maka realisasi tahun 2014 masih jauh dari yang diharapkan sehingga capaian kinerja indikator ini hanya sebesar 41,61%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup besar. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan, yaitu :

- Usulan tersebut telah diakomodasi pada tahun berjalan;
- Usulan belum bisa ditampung karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga perlu dilihat skala prioritas dan manfaatnya kepada masyarakat;
- Usulan masyarakat, terutama bidang fisik terkendala pada status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.

9) **Tingkat usulan yang diakomodasi dalam APBD**

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan usulan masyarakat pada bidang prasarana wilayah berjumlah 253 usulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 usulan ditampung dalam APBD tahun 2015. Sementara itu usulan masyarakat pada bidang ekonomi untuk tahun 2015 sebanyak 58 usulan, sedangkan yang ditampung dalam APBD 2015 sebanyak 25 usulan, sedangkan di bidang Sosial Budaya dari 74 usulan, terdapat 33 usulan yang dapat diakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Sehingga dari total 385 usulan, yang dapat ditampung dalam APBD tahun 2015 adalah sebanyak 156 usulan atau 40,52%. Target yang ditetapkan untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 77%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 52,62%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, tingkat usulan yang diakomodir dalam APBD ini juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena :

- Terdapat usulan masyarakat yang dialihkan pendanaannya pada APBD provinsi dan APBN;
- Usulan belum bisa ditampung karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga perlu dilihat skala prioritas dan manfaatnya kepada masyarakat.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SOLOK

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase ketersediaan data	85%	90%	-	-	90,13%	90%	93%	95%	
2.	Persentase akurasi data	75%	80%	-	-	80,26%	80%	83%	85%	
3.	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	-	-	75%	100%	100%	100%	Koordinasi dengan legislatif perlu di tingkatkan agar kesepahaman dapat cepat dicapai
4.	Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi	100%	100%	-	-	46,51%	90%	100%	100%	Perlu ditingkatkan koordinasi bidang agar target pembangunan dapat tercapai
5.	Tingkat pencapaian target pembangunan bidang sosial budaya	100%	100%	-	-	64,51%	90%	100%	100%	Perlu ditingkatkan koordinasi bidang agar target pembangunan dapat tercapai
6.	Tingkat pencapaian target pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	-	-	75%	90%	100%	100%	Perlu ditingkatkan koordinasi bidang agar target pembangunan dapat tercapai
7.	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan	85%	90%	-	-	90,21%	90%	93%	95%	
8.	Tingkat usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	93%	95%	-	-	38,7%	95%	95%	98%	Perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap fasilitator kelurahan/kecamatan
9.	Tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD	77%	80%	-	-	40,52%	80%	80%	83%	Perlu komitmen yang kuat untuk memprioritaskan usulan masyarakat dalam APBD

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang perencana, sehingga dapat dihasilkan aparatur perencana yang kreatif dan inovatif.
2. Belum optimalnya implementasi penyusunan dokumen perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan
3. Penetapan indikator kinerja yang terukur dan tepat sasaran
4. Usulan program kegiatan pembangunan SKPD belum sepenuhnya mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan daerah.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kota, Bappeda menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi
4. Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kota Solok
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Setiap dokumen perencanaan haruslah runtut. Dokumen yang lebih tinggi cakupan perencanaannya menjadi acuan bagi dokumen yang lebih kecil cakupannya.

Berkaitan dengan hal itu, setelah diadakan perbandingan dan analisis terhadap rancangan awal RKPD Kota Solok tahun 2016 dan Rancangan Renja Bappeda tahun 2016 maka program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Renja Bappeda telah selaras dengan program prioritas pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2016.

Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2016, prioritas pembangunan daerah yang harus dilaksanakan oleh Bappeda digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Solok

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	Program perencanaan pembangunan daerah					
	- Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD	-	-	-	-	- Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD	Kota Solok	Tersedianya rancangan RPJMD Kota Solok tahun 2016-2020	1 paket	250.000	
	- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	-	-	-	-	- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Kota Solok	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	1 paket	100.000	
	- Penetapan RPJMD	-	-	-	-	- Penetapan RPJMD	Kota Solok	Tersedianya Perda RPJMD Kota Solok tahun 2016-2020	1 paket	100.000	
	- Kegiatan Penyusunan RKPD	-	-	-	-	- Kegiatan Penyusunan RKPD	Kota Solok	Tersedianya Perwako tentang RKPD 2017	1 paket	60.825	
	- Kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	-	-	-	- Kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kota Solok	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1 paket	132.659	
	- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bintek fasilitator telah dilaksanakan tahun 2014
	- Kegiatan penanggulangan kemiskinan	-	-	-	-	- Kegiatan penanggulangan kemiskinan	Kota Solok	- Tersedianya LP2KD - Rapat TKPK	1 paket	26.230	
	- Kegiatan penyusunan perubahan RKPD	-	-	-	-	- Kegiatan penyusunan perubahan RKPD	Kota Solok	Tersedianya Perwako tentang RKPD 2017	1 paket	43.000	
	- Kegiatan evaluasi RKPD	-	-	-	-	- Kegiatan evaluasi RKPD	Kota Solok	Dokumen evaluasi RKPD semester 1 dan 2	2 dokumen		
	- Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	-	-	- Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kota Solok	- Rapat money DAK dan non APBD - Rapat koordinasi	4 kali	90.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah					Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah					
	- Kegiatn penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	-	-	-	-	- Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Kota Solok	Tersedianya : - Buku publikasi BPS - Dokumen indikator makroekonomi daerah - Buku saku statistik daerah - Statistik potensi dan kekhasan daerah	1 paket 100 buku 200 buku 100 buku	100.200	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat, tetapi Bappeda mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan SKPD yang menyangkut dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya Bappeda Kota Solok akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan unsur lainnya. Usulan ini kemudian dikoordinasikan dengan SKPD yang bersangkutan untuk diakomodasi dalam Renja SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas Bappeda Kota Solok selaku badan perencana berkewajiban untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka :

- 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, pemerintah telah menetapkan Peraturan presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Didalam Perpres tersebut dirumuskan sembilan agenda prioritas, yang disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Bappeda, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di daerah turut mendukung prioritas pembangunan nasional tersebut dengan mengkoordinasikannya dengan SKPD teknis agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar rencana pembangunan yang disusun daerah dapat diserasikan dengan rencana pembangunan nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah Kota Solok Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan
2. Mewujudkan sinergisitas perencanaan pembangunan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan
3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan prasarana wilayah
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2016 Bappeda Kota Solok menyelenggarakan 5 (lima) Urusan Wajib, yaitu:

- 1) Urusan Perencanaan Pembangunan,
- 2) Urusan Penataan Ruang
- 3) Urusan Statistik,
- 4) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dan
- 5) Urusan Komunikasi dan Informatika,

Secara keseluruhan meliputi 14 program dan 44 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung untuk tahun 2016 sebesar **Rp.4.756.130.750,-**.

Secara umum, program dan kegiatan Bappeda Kota Solok tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan alat tulis kantor
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
 - g) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i) Penyediaan makanan dan minuman

- j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - c) Pengadaan mobiler
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala mobiler kantor
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 3. Program Peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
 5. Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD
 6. Program pengendalian dan pemanfaata ruang, dengan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas Kab/ Kota
 7. Program pengembangan data/ informasi, dengan kegiatan :
 - a) Penyusunan dan pengumpulan database informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah
 - b) Penyusunan profil daerah
 8. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :
 - a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik
 - b) Penyusunan rancangan RPJMD
 - c) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
 - d) Penetapan RPJMD
 - e) Penyusunan rancangan RKPD
 - f) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - g) Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - h) Koordinasi penanggulangan kemiskinan

- i) Penyusunan Perubahan RKPD
 - j) Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015
 - k) Evaluasi RKPD
9. Program perencanaan pembangunan ekonomi, dengan kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
10. Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya, dengan kegiatan :
- a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
 - b) Penumbuhan dan pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Program Krenova)
11. Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dengan kegiatan :
- a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan sarana wilayah
 - b) Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman
12. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan :
- a) Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2016
 - b) Penyusunan perubahan KUA dan PPAS tahun 2015
13. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah, dengan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
14. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa, dengan kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 disajikan dalam Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam Renja Bappeda Tahun 2016 ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Sehubungan dengan belum disusunya Renstra Bappeda yang baru maka penyusunan Renja Bappeda tahun 2016 masih tetap berpedoman pada Renstra Bappeda tahun 2010-2015 dengan tetap mempedomani RPJPD Kota Solok. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam melaksanakan semua kegiatan dalam Renja ini, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Bappeda ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Bappeda ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Tahun 2016.

Solok, Februari 2015

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

VIVERI ANDRA, SH, MSi
NIP. 19641107 198903 1 008